

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap. Menurut Usman (2002:70) implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan, atau dapat pula dikatakan sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan. Maka implementasi dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.

Dalam pengertian ini, yang dimaksud dengan implementasi adalah penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap. Dalam hal ini implementasikan merupakan penerapan suatu hal yang sudah menjadi kesepakatan bersama baik berupa perubahan pengetahuan, nilai bahkan sikap yang telah disepakati bersama.

2. Pengertian Sejarah Kurikulum

Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Kurikulum (*curriculum*) berasal dari bahasa Yunani, yaitu *curir* yang berarti berlari dan *currere* yang artinya tempat berpacu. Dalam bahasa Latin "*curriculum*" semula

berarti *a running course, or race course, especially a chariot race course* dan terdapat pula dalam bahasa Prancis "*courier*" artinya "*to run, berlari*". Kemudian istilah itu digunakan untuk sejumlah "*courses*" atau matapelajaran yang harus ditempuh untuk mencapai suatu gelar atau ijazah. Dalam bahasa Arab, kurikulum diartikan dengan manhaj, yakni jalan yang terang yang dilalui oleh manusia pada bidang kehidupan dan kemudian diterapkan dalam bidang pendidikan. UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 menjelaskan kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan.

Kebijakan kurikulum di Indonesia secara sederhana dapat dipetakan menjadi tiga bagian yaitu masa prakemerdekaan, kemerdekaan, dan reformasi. Berikut ini adalah kaleidoskop kebijakan kurikulum di Indonesia dari masa pra kemerdekaan dimana pada masa ini sekolah sudah mulai dikenalkan meski masih sangat terbatas, sampai pada masa reformasi.

a. Kebijakan Kurikulum Pendidikan Masa Pra Kemerdekaan

Kebijakan pendidikan pada masa pra kemerdekaan dipengaruhi oleh kolonialisme, dimana kebijakan dan praktik pendidikan dikelola dan dikendalikan oleh penjajah. Tujuannya adalah mendukung dan memperkuat kepentingan kekuasaan penjajah, dan menjadikan pribumi sebagai abdi penjajah. Untuk memenuhi kebutuhan pegawai dalam pengembangan usaha melalui kerja paksa, penjajah membutuhkan pegawai rendahan yang dapat membaca dan menulis. Oleh karena itu, penjajah membentuk lembaga-lembaga pendidikan yang hanya diperuntukkan bagi kalangan terbatas, yaitu anak-anak golongan ningrat yang selanjutnya diproyeksikan sebagai pegawai rendahan. Terdapat dua bentuk kebijakan pendidikan pada masa kolonial ini yaitu. Pertama, kebijakan Sekolah Kelas Dua yang diperuntukkan bagi anak pribumi dengan lama pendidikan 3 tahun. Kurikulum yang diajarkan meliputi

berhitung, menulis dan membaca. Kedua, kebijakan Sekolah Kelas Satu yang diperuntukkan bagi anak pegawai pemerintah Hindia Belanda. Lama pendidikannya 4 tahun, kemudian 5 tahun dan terakhir 7 tahun. Kurikulum yang diajarkan meliputi ilmu bumi, sejarah, dan ilmu hayat.

b. Kebijakan Kurikulum Pendidikan Pasca Kemerdekaan

Kebijakan kurikulum pendidikan pada masa pasca kemerdekaan, dibatasi sampai pada masa reformasi yang dimulai pada tahun 1998. Reformasi membawa dampak yang luar biasa bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Hal ini diawali dengan terbitnya UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 beserta turunan perundang-udangannya. Kebijakan kurikulum pendidikan pasca kemerdekaan dimulai pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, dan 1994.

1) Kurikulum 1947

Awal terbentuknya kurikulum 1947, namanya adalah Rencana Pembelajaran 1947 atau dikenal dengan sebutan leer plan. Yang menjadi ciri utama pada kebijakan kurikulum 1947 ini adalah kurikulum ini lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Pada masa tersebut, siswa lebih diarahkan tentang cara bersosialisasi dengan masyarakat. Aspek afektif dan psikomotorik lebih ditekankan dengan pengadaan pelajaran kesenian dan pendidikan jasmani. Penekanannya adalah menumbuhkan kesadaran bela negara.

2) Kurikulum 1952

Kebijakan kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kebijakan kurikulum ini merupakan lanjutan dari hasil kajian Panitia Penyelidik Pengajaran sebelumnya, dan hasil dari Jawatan Pengajaran di Surakarta yang telah menyusun rencana pelajaran terurai pada tahun 1947 namun belum sempat dilaksanakan dan baru dapat dikemukakan lagi sebagai rencana pelajaran terurai pada tahun 1952. Rencana pelajaran terurai ini merupakan respond dan hasil

penyesuaian dengan UU Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pendidikan dan Pelajaran. Ciri yang paling menonjol dari kurikulum 1952 adalah setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Pada masa ini, kebutuhan peserta didik akan ilmu pengetahuan lebih diperhatikan, dan satuan mata pelajaran lebih dirincikan. Namun, peserta didik masih diposisikan sebagai obyek, karena guru menjadi subyek sentral dalam mentransfer ilmu pengetahuan. Guru menentukan apa saja yang akan diperoleh siswa di kelas, dan guru pula yang menentukan standar-standar keberhasilan siswa dalam proses pendidikan.

3) Kurikulum 1964

Menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini, kebijakan yang diambil adalah bernama Rencana Pendidikan 1964 atau Kurikulum 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 adalah pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pantja Wardhana (Pancawardhana) yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Prinsip-prinsip Pantja Wardhana sebagai sistem pendidikan adalah 1) perkembangan cinta bangsa dan tanah air, moral nasional internasional/keagamaan, 2) perkembangan kecerdasan, 3) perkembangan emosional artistic atau rasa keharuan dan keindahan lahir batin, 4) perkembangan keprigelan atau kerajinan tangan, dan 5) perkembangan jasmani.²⁰

4) Kurikulum 1968

Kebijakan kurikulum 1968 merubah struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta

mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan.

5) Kurikulum 1975

Kebijakan kurikulum 1975 menekankan pada tujuan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Pada kurikulum ini, peran guru menjadi lebih penting, karena setiap guru wajib membuat rincian tujuan yang ingin dicapai selama proses belajar-mengajar berlangsung. setiap guru harus secara detail merencanakan pelaksanaan program belajar mengajar. Dengan kurikulum ini semua proses belajar mengajar menjadi sistematis dan bertahap.

6) Kurikulum 1984

Kebijakan kurikulum 1984 mengusung *process skill approach*. Kurikulum 1984 ini lahir sebagai perbaikan dari kurikulum sebelumnya (kurikulum 1975). Kurikulum 1984 mempunyai ciri-ciri 1) berorientasi pada tujuan pembelajaran (intruksional), 2) pendekatan pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau Student Active Learning (SAL), 3) materi pembelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral, 4) menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan, 5) Materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa, 6) menggunakan pendekatan ketrampilan proses (*process skill approach*).²² Karena sifatnya yang senralistik, kurangnya sosialisasi dan minimnya daya dukung implementasi kurikulum maka banyak sekolah yang kurang mampu menterjemahkan, dan menerapkan CBSA, sehingga pada akhirnya banyak penolakan terhadap kurikulum ini. g) Kurikulum 1994 Kebijakan terhadap kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep

dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Pada Kurikulum ini menekankan pada prinsip Link and Match pada sekolah kejuruan seperti STM (Sekolah Teknik Menengah). Link and Match adalah prinsip tentang pentingnya keterkaitan pendidikan dengan dunia kerja atau industri. Sekolah harus mampu menyiapkan tenaga-tenaga kerja yang terampil yang dibutuhkan oleh industri. Sebaliknya dunia industri juga harus bersinergi dengan lembaga-lembaga pendidikan. Pada akhirnya kurikulum ini banyak dikritik karena pendidikan menjadi kepanjangan tangan dari proses industrialisasi dan tidak memanusiakan manusia (dehumanisasi).

c. Kebijakan Kurikulum Masa Reformasi

Reformasi membawa dampak besar bagi perkembangan pendidikan nasional. Dengan UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 menjadi babak baru bagi sistem pendidikan nasional. Kebijakan-kebijakan pendidikan pun dikeluarkan sebagai amanat undang-undang. Sampai saat ini, kebijakan terkait dengan kurikulum pendidikan pada masa reformasi dapat dipetakan menjadi tiga bagian yaitu kebijakan kurikulum 2004 berupa Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), kurikulum 2006 yang dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), dan kurikulum 2013. Berbagai perubahan tersebut merupakan bentuk respon dan perkembangan terhadap berbagai perubahan yang dihadapi baik dalam sistem sosial, politik, budaya, ekonomi, dan Ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara singkat kebijakan dan bentuk perubahan-perubahan kurikulum masa reformasi adalah sebagai berikut:

1) Kurikulum 2004 (KBK)

Kebijakan kurikulum 2004 dikenal dengan sebutan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Pendidikan berbasis kompetensi menitikberatkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan (kompetensi) tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan. Diantara karakteristik utama

KBK yaitu: menekankan pencapaian kompetensi siswa, bukan tuntasnya materi. Kurikulum dapat diperluas, diperdalam, dan disesuaikan dengan potensi siswa, Pendekatan dan metode yang digunakan beragam dan bersifat kontekstual.

2) Kurikulum 2006 (KTSP)

Kebijakan kurikulum 2006 ini dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Ciri yang paling menonjol adalah guru diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Hal ini disebabkan Karangka Dasar (KD), Standar Kompetensi Lulusan (SKL), dan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SKKD) setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Tujuan KTSP meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi, potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu, kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerahnya.

3) Kebijakan Kurikulum 2013

Kurikulum memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dan strategis. Meskipun bukan satu-satunya faktor utama keberhasilan proses pendidikan, kurikulum menjadi petunjuk dan arah terhadap keberhasilan pendidikan. Kurikulum menjadi penuntun (guide) para pelaksana pendidikan pendidik, tenaga kependidikan untuk mengembangkan kreativitas dan kemampuannya dalam mengembangkan dan menjabarkan berbagai materi dan perangkat pembelajaran. Oleh karena itu, pendidik dan tenaga kependidikan yang baik adalah yang mampu memahami kurikulum dan mengimplementasikannya pada proses pembelajaran. Namun demikian, perubahan, pengembangan, dan perbaikan terus dilakukan seiring dengan tututan dan perubahan zaman dalam berbagai aspek

kehidupan-globalisasi. Pergulatan perubahan kurikulum sangat nampak pada tahun 1975, tahun 1984, tahun 1994, yang menuai berbagai dikritik karena dinilai terlalu banyak mata pelajaran dan terlalu padat materi. Padatnya kurikulum berdampak pada padatnya informasi dalam buku teks. Pada tahun 1975, pembaruan kurikulum didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat itu, sehingga pembaruan tersebut menghasilkan kurikulum 1975 yang sangat sarat beban dan sarat muatan, bahan-bahan yang berat dan sangat berorientasi pada sasaran hasil. Hal ini dipengaruhi oleh paradigma kerangka instruksional, yang sangat mendasarkan diri pada sasaran, instruksi dan evaluasi. Pembaharuan Kurikulum tahun 1984 berusaha menyederhanakan itu semua. Pembaruan tahun 1994 memadukan teknologi melalui pemecahan masalah, berfikir kritis, dan keterampilan bertanya dalam praktik di kelas.

Perubahan Kurikulum 2013 merupakan wujud pengembangan dan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya-kurikulum KTSP tahun 2006-yang dalam implementasinya dijumpai beberapa masalah yaitu (1) Konten kurikulum terlalu padat yang ditunjukkan dengan banyaknya matapelajaran dan banyak materi yang keluasan dan tingkat kesukarannya melampaui tingkat perkembangan usia anak, (2) Belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, (3) Kompetensi belum menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan, (4) Beberapa kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan-misalnyapendidikan karakter, metodologi pembelajaran aktif, keseimbangan soft skills dan hard skills, kewirausahaan-belum terakomodasi di dalam kurikulum, (5) Kurikulum belum peka dan tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun global, (6) Standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci sehingga membuka

peluang penafsiran yang beraneka ragam dan berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru. (7) Standar penilaian belum mengarahkan pada penilaian berbasis kompetensi (proses dan hasil) dan belum secara tegas menuntut adanya remediasi secara berkala, dan (8) Dengan KTSP memerlukan dokumen kurikulum yang lebih rinci agar tidak menimbulkan multitafsir.

Perubahan kebijakan 2013 menyangkut empat elemen perubahan kurikulum yaitu pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Isi (SI), Standar Proses, dan Standar Penilaian. Sedangkan perubahan kebijakan kurikulum 2013 berdampak pada empat hal yaitu model pembelajaran berupa tematik-integratif, pendekatan saintifik, strategi aktif, dan penilaian autentik. Perubahan kebijakan tersebut dalam rangka menyiapkan generasi masa depan Indonesia yang kreatif, inovatif, produktif, dan afektif yang mampu membawa bangsa Indonesia maju dan ber peradapan di masa yang akan datang. Seiring berjalannya waktu kurikulum di Indonesia mengalami perubahan, yang mana pada Pembelajaran Kurikulum 2013 umumnya hanya fokus pada intrakurikuler atau tatap muka, sedangkan Kurikulum Merdeka menggunakan paduan pembelajaran intrakurikuler (70-80% dari Jam pelajaran) dan kokurikuler (20-30% Jam Pelajaran) melalui proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila.

B. Kurikulum Merdeka

1. Pengertian Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam dan optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Menurut Susilowati, E. (2022:120-121) kurikulum merdeka belajar adalah kurikulum pembelajaran yang berkaitan dengan pendekatan bakat dan minat. Di sini, siswa (baik laki-laki maupun perempuan) dapat memilih mata pelajaran yang ingin dipelajari sesuai dengan bakat dan minatnya.

Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) sebagai bentuk penilaian perbaikan kurikulum 2013. Silabus prototipe merupakan penyederhanaan dari silabus 2013 dengan sistem pembelajaran berbasis proyek. Selanjut nya, menurut Barlian,UC. & Solekah,S. (2022:2108) Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Sedangkan menurut Rosadi, HY & Andriyani (2021 : 359) kurikulum merdeka Belajar merupakan sebuah tantangan Kondisi ini memaksa guru atau sekolah harus mencari solusi agar dapat memberikan pelayanan pembelajaran, sehingga proses pembelajaran tetap optimal. Kondisi pandemi ini yang memiliki peran penting agar proses pembelajaran tetap dapat dilaksanakan dengan optimal tanpa mengurangi kejenuhan siswa yaitu dengan menggunakan media daring. Dengan penggunaan media daring dalam proses pembelajaran, merupakan solusi untuk mendukung anjuran untuk belajar dari rumah dan menaati Physical Distancing untuk memutus rantai Covid-19 dapat dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas kurikulum merdeka merupakan Kurikulum Merdeka kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik.

Aspek-aspek dalam implementasi kurikulum merdeka (IKM) menurut Yeti Ardianti & Amalia (2022 :400) sebagai berikut:

- a. Perencanaan kurikulum merdeka

- 1) Mandiri Belajar
 - 2) Mandiri Berubah
 - 3) Mandiri Berbagi.
- b. Pelaksanaan dan penggunaan perangkat ajar untuk penguatan kurikulum merdeka
- 1) Buku teks pelajaran
 - 2) Modul ajar
 - 3) Modul proyek penguatan profil pelajar pancasila
- c. Kendala dalam pelaksanaan kurikulum merdeka dengan indikator:
- 1) Minimnya pengalaman guru dalam mengajar kurikulum merdeka belajar
 - 2) Keterbatasan Referensi
 - 3) Manajemen Waktu

2. Tujuan Kurikulum Merdeka

Kurikulum merdeka belajar memiliki tujuan yang sangat positif bagi seluruh anggota yang terlibat dalam proses pembelajaran. Adapun Tujuannya sebagai berikut Menurut (Ainia, 2020:43) 1. Setiap orang yang terlibat didalamnya memiliki kebebasan untuk berinovasi demi mengembangkan kualitas pembelajaran 2. Guru dituntut untuk belajar kreatif agar mampu memberikan pengalaman pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa 3. Siswa diberi kesempatan untuk belajar secara mandiri untuk memperoleh berbagai macam informasi untuk mendukung proses pembelajarannya 4. Setiap unit pendidikan berhak untuk mengelaborasi setiap faktor yang akan mendukung proses pembelajaran di kelas 5. Adanya penghargaan keberagaman yang ada dalam sistem Pendidikan

3. Manfaat Kurikulum Merdeka Belajar Bagi Guru dan Siswa

Manfaat Kurikulum Merdeka Belajar yang bersifat memberikan kebebasan kepada seluruh komponen dalam satuan pendidikan dari

Sekolah, Guru hingga siswa. Kurikulum Merdeka merupakan salah satu kurikulum yang merubah konsep sistem pembelajaran di Indonesia. Nadiem Makarim Kurikulum Merdeka dapat mencapai sebuah keberhasilan pendidikan Indonesia untuk dapat mengedepankan pembelajaran bagi siswa. Menurut (Ainia, 2020:45) Keunggulan Kurikulum Merdeka Belajar untuk guru yaitu dapat memberikan Kurikulum Merdeka Belajar dengan beban kerja yang berkurang, penyederhanaan RPP dan Keunggulan lain nya. guru bisa dapat leluasa dalam melaksanakan pembelajaran serta beban tugas administrasi lebih sederhana sehingga dalam menjalankan sebagai guru lebih terasa nyaman. Penyederhanaan RPP dengan Kurikulum merdeka dapat memberikan ruang luas dalam penyederhanaan rancangan pelaksanaan pembelajaran sehingga pada proses evaluasi terdapat aturan yang memberikan kebebasan bagi guru dalam pembuatan, pemanfaatan serta pengembangan RPP. Membangun Suasana belajar menarik dan menyenangkan membuat suasana pembelajaran tidak membosankan bagi guru maupun siswa dalam melaksanakan aktivitas belajar, dengan tujuan memperbaiki kualitas pembelajaran.

4. Pelaksanaan Kurikulum Merdeka

a. Mandiri Belajar

Sekolah menggunakan struktur Kurikulum 2013 dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan beberapa prinsip Kurikulum Merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen.

b. Mandiri Berubah

Sekolah menggunakan struktur Kurikulum Medaka dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen.

c. Mandiri Berbagi.

Sekolah menggunakan struktur Kurikulum Merdeka dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen, dengan komitmen untuk membagikan praktik-praktik baiknya kepada satuan pendidikan lain.

5. Penggunaan Perangkat Ajar Untuk Penguatan Kurikulum Merdeka

a. Buku teks pelajaran

Buku teks merupakan sebuah buku yang berisi uraian bahan tentang mata pelajaran atau bidang studi tertentu, yang disusun secara sistematis dan telah diseleksi berdasarkan tujuan tertentu, orientasi pembelajaran, dan perkembangan siswa untuk diasimilasikan.

b. Modul ajar

Modul Ajar merupakan salah satu jenis perangkat ajar dalam Kurikulum Merdeka yang dirancang secara lengkap dan sistematis sebagai panduan dan pedoman guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.

c. Modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila

Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila merupakan sebuah pendekatan pembelajaran melalui proyek dengan sasaran utama mencapai dimensi profil pelajar Pancasila. Peserta didik akan belajar menelaah tema-tema tertentu yang menjadi prioritas setiap tahunnya.

6. Kendala Dalam Pelaksanaan Kurikulum Merdeka

a. Minimnya pengalaman guru dalam mengajar kurikulum merdeka belajar. Tidak Memiliki Pengalaman dengan Kemerdekaan Belajar

Pengalaman personal para guru terkait kemerdekaan belajar masih minim.

b. Keterbatasan referensi

Buku teks yang ada saat ini dinilai masih berkualitas cukup rendah. Baik buku guru maupun siswa yang diterbitkan pusat perbukuan atau penerbit swasta belum memberikan referensi yang dapat membantu guru dalam memperoleh rujukan terkait bagaimana

memfasilitasi pembelajaran berpusat pada siswa dengan efektif. Keterbatasan dalam mendapatkan referensi pelaksanaan Merdeka Belajar inilah yang kemudian juga menjadi guru dalam menciptakan kegiatan pembelajaran yang sesuai.

c. Manajemen waktu.

Dalam upaya transformasi proses pembelajaran, guru mungkin membutuhkan waktu lebih untuk belajar lagi supaya dapat adaptif dengan tuntutan perubahan yang diharapkan. Beberapa sekolah menentukan agenda yang cukup padat untuk melibatkan guru agar berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan. Belum tugas-tugas dan tanggung jawab lain yang menyertai. Guru sebisa mungkin bergerak dan menemukan cara kreatif inovatif dalam pembelajaran. Tidak semua guru mampu mengatur waktunya dengan baik, terutama dengan kesibukan atau persoalan yang lain yang sekiranya dihadapi.

7. Kebijakan Merdeka Belajar

Kebijakan merdeka belajar adalah untuk menggali potensi terbesar para guru dan murid serta meningkatkan kualitas pembelajaran, dengan memberikan kemerdekaan kepada guru untuk memilih cara penyampaian kurikulum atau cara mengajar yang sesuai dengan kompetensi peserta didiknya.

Menurut Kemendikbud (Sintia, 2021:10), Merdeka Belajar adalah memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. inti Merdeka Belajar adalah sekolah, guru dan murid memiliki kebebasan untuk melakukan inovasi, bebas untuk belajar dengan mandiri dan kreatif (GTK, 2019). Kebijakan merdeka belajar dapat terwujud secara optimal melalui:

- a. Peningkatan kompetensi kepemimpinan, kolaborasi antar elemen masyarakat, dan budaya.
- b. Peningkatan sarana prasarana serta pemanfaatan teknologi informasi pendidikan di seluruh satuan pendidikan.
- c. Perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan; dan

d. Penyempurnaan kurikulum, pedagogi, dan asesmen.

(Permendikbud No. 22 Tahun 2020) Perubahan Kebijakan Merdeka Belajar akan terjadi pada kategori:

(1) ekosistem pendidika, (2) guru, (3) pedagogi; (4) kurikulum, (5) sistem penilaian. Pada lingkungan pendidikan, Kemendikbud akan mengubah pandangan dan praktik yang bersifat mengekang kemajuan pendidikan, seperti penekanan pada pengaturan yang kaku, persekolahan sebagai tugas yang memberatkan, dan manajemen sekolah yang terfokus pada urusan internalnya sendiri menjadi ekosistem pendidikan yang diwarnai oleh suasana sekolah yang menyenangkan, keterbukaan untuk melakukan kolaborasi lintas pemangku kepentingan pendidikan.

8. Perencanaan Pembelajaran di Era Merdeka Belajar

Perencanaan Pembelajaran di era Merdeka Belajar Tantangan masa depan telah mendorong pemerintah untuk merevisi kurikulum pendidikan. Upaya pemerintah terhadap perubahan revolusi industri yang begitu cepat ialah melalui edukasi. Proses edukasi telah melalui berbagai fase. Fase 1 adalah pembelajaran yang berpusat pada guru, dimana guru sebagai pusat pengetahuan dan buku pelajaran sebagai sumber materi. Fase 2, pembelajaran berpusat pada interaksi antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. Fase 3 adalah pembelajaran yang berpedoman pada kolaborasi. Fase 4 adalah pembelajaran yang lebih fleksibel dan kreatif, fase ini pembelajar dapat menekuni lintas bidang ilmu ataupun pembelajaran jarak jauh. Fase ini, pendidikan dapat melampaui batas. Artinya, akses pembelajar terhadap informasi sangatlah luas. Maka peran guru haruslah mampu memfasilitasi pembelajar agar mereka tetap on the track. Guru harus mampu menyediakan kegiatan bagi pembelajar untuk memecahkan masalah dan berbasis pada team-work. Pada sistem penilaian, pembelajar dinilai sebagai proses berjuang selama kegiatan pembelajaran dan bukan atas dasar tes dan nilai saja. Dengan alasan tersebut, maka pemerintah menerapkan pendidikan yang merdeka, atau dikenal dengan merdeka belajar

9. Kelebihan Kurikulum Merdeka Belajar

Kemampuan utama pada pendidikan adalah berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis serta berpikir kreatif. Pertama, implementasi merdeka belajar tidak terbatas ruang dan waktu, dengan mengunjungi tempat wisata, museum dan lainlain. Kedua, berbasis pada proyek, dengan menerapkan keterampilan yang telah dimiliki. Ketiga, pengalaman di lapangan dengan kolaborasi antara dunia pendidikan dan dunia industri, peserta didik diarahkan untuk terjun ke lapangan untuk menerapkan soft skill dan hard skill agar mereka siap memasuki dunia kerja. Praktik ini ciri pendidikan SMA. Keempat, *personalized learning*. Pada tahap ini, pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan peserta didik, aktivitas pembelajar tidak dibuat sama rata. Kelima, interpretasi data. untuk mendukung proses pendidikan dan digunakan sebagai sentral memecahkan masalah serta disesuaikan dengan kebutuhan. (Chahyanti, 2021). Cara pandang penerapan merdeka belajar, guru menjadi fasilitator yang memotivasi peserta didik untuk merdeka belajar”. dan menyediakan aktivitas bagi peserta didik untuk mengeksplorasi diri agar setiap peserta didik memiliki pengalaman dalam pembelajaran yang merdeka.

10. Kelemahan Kurikulum Merdeka Belajar

Program merdeka belajar belum sempurna untuk dilakukan. Ada beberapa kendala atau tantangan yang harus dihadapi. Berikut ini merupakan 5 tantangan program merdeka belajar bagi guru, di antaranya yaitu: a) Keluar dari Zona Nyaman Sistem Pembelajaran; b) Tidak Memiliki Pengalaman Program Merdeka Belajar; c) Keterbatasan Referensi; d) Keterampilan Mengajar; e) Minim Fasilitas dan Kualitas Guru. (Supini, 2020). Menurut penulis, untuk mencapai kemerdekaan belajar tanpa kendala, guru membutuhkan dukungan dari semua pihak, mulai dari orangtua siswa, siswa, sekolah, pemerintah hingga masyarakat luas. bentuk dukungan dari pemerintah yaitu dengan membuat pelatihan atau pembelajaran bagi guru untuk meningkatkan kompetensi guru.

11. Indikator Kurikulum Merdeka Belajar

Menurut Putri Dwi Pertiwi, Novaliyosi, dkk (2023:1720) untuk mengetahui kesiapan guru dalam implementasi kurikulum merdeka terdapat enam indikator sebagai berikut:

a. Pemahaman Karakteristik dan Struktur Kurikulum Merdeka

Antara lain pengembangan soft skills dan karakter peserta didik serta berbasis kompetensi, pembelajaran yang fleksibel, dan karakter pancasila.

b. Kesiapan Rencana Pembelajaran

Merupakan tindakan yang dilakukan guru dalam mempersiapkan proses pembelajaran sehingga dapat berjalan dengan lancar efektif dan efisiensi

c. Kesiapan Proses Pembelajaran

Merupakan kondisi fisik, kondisi mental, kondisi emosional, kebutuhan motivasi dan pengetahuan.

d. Kesiapan Modul Bahan Ajar

Modul dan bahan ajar kurikulum merdeka merupakan perangkat pembelajaran yang disusun oleh guru untuk merencanakan proses pembelajaran berupa RPP. penyusunan modul ajar di disesuaikan dengan capaian pembelajaran fase atau tahap perkembangan peserta didik.

e. Kesiapan Sarana dan Prasarana

Merupakan Peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan untuk menunjang proses pendidikan

f. Kesiapan Penilaian Pembelajaran

Penilaian pembelajaran merupakan evaluasi untuk mengungkapkan hasil belajar siswa dalam mengikuti proses pembelajaran.

Kurikulum merdeka belajar memiliki indikator keberhasilan untuk mencapai tujuan pembelajaran, adapun indikator keberhasilan program kurikulum merdeka belajar sebagai berikut:

- a. Partisipasi siswa-siswi dalam pendidikan Indonesia yang merata.
Partisipasi siswa siswa mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru dan mengamati apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya.
- b. Pembelajaran yang efektif,
Kualitas pembelajaran berkenaan dengan seberapa tinggi tingkat informasi atau keterampilan yang disajikan kepada para peserta didik itu mudah dipelajari mereka. Kualitas pembelajaran itu pada umumnya berupa hasil yang berkualitas berkenaan dengan pengalaman belajar atau kurikulum dan pelajaran itu.
- c. Tidak adanya ketertinggalan anak didik
Dengan adanya kurikulum merdeka belajar peserta didik harus mengejar ketertinggalan materi pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu indikator dari program kurikulum merdeka belajar ini membuat percepatan/ akselerasi dari pembelajaran yang telah tertinggal dan memperkuat pembelajaran pendidikan pancasila dengan mengutamakan sikap-sikap moral terhadap peserta didik.

C. Hasil Penelitian yang Relevan

Berdasarkan pengamatan penulis, ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis teliti, yaitu:

1. Talith Ikhtiara, Agus Jaya, Hanifa Raiha Zahratina, Dea Kristia Madalena, Noventa Putri, Ade Suryanta. 2022. Judul penelitian *Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Pembelajaran multimedai Di Sekolah Urban*. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode deskriptif. Pengumpulan data pada penelitian dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil analisis deskriptif penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran multimedia di SMA Negeri 89 Jakarta berjalan secara efektif dan sistematis, yakni tersedianya kurikulum, metode ajar, bahan ajar, media ajar, fasilitas yang memadai, serta sumber pembelajaran yang sesuai dengan memperhatikan kebutuhan karakteristik siswa. Terdapat juga hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran multimedia di SMA Negeri 89 Jakarta, yaitu masih

minimnya ketersediaan buku teks multimedia sebagai sumber pembelajaran yang tersedia di sekolah dan keterbatasan guru dalam mendapatkan referensi pelaksanaan merdeka belajar. Oleh karena itu, guru diharuskan dapat beradaptasi dengan perubahan kurikulum dengan memanfaatkan teknologi untuk memperbanyak sumber pembelajaran.

2. Nur Azizah Febrianti. 2022 Judul penelitian *Analisis Penerapan Kurikulum Merdeka Pada Pembelajaran Multimedia Sebagai Pembentukan Keterampilan Berpikir Kritis*. Dalam penelitian ini teknik yang dipakai adalah teknik pengambilan data berbasis kualitatif. Pengumpulan hasil observasi ini adalah jenis penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan informasi tentang karya sastra Indonesia berupa jurnal, buku, artikel dan karya penelitian lainnya. Menurut data yang dihimpun menampilkan bahwa peserta didik dapat berpikir lebih tajam ketika menerapkan kurikulum pembelajaran mandiri karena proses pembelajaran menciptakan suasana inovatif dan kreatif. Siswa belajar sesuai dengan kemampuan dan kemungkinannya serta lebih mandiri dalam belajar. Kemudian Anda menawarkan kesempatan untuk membangun pengetahuan secara mandiri. Namun, kurikulum pembelajaran mandiri memiliki kelemahan karena standar yang kurang, kualitas tes atau ujian dapat bermasalah dan guru dapat mengabaikan keefektifan proses dan media pembelajaran karena metode dan lingkungan belajar tidak jelas. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).